



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS TENAGA KERJA**

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBUNAN I  
TAHUN 2026  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 63 Telp/Fax : (0322) 316147  
e-mail : [disnaker@lamongankab.go.id](mailto:disnaker@lamongankab.go.id) website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	.....&&*

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi  <b>HARTONO, S. Sos.</b> NIP. 19691002 199703 1 005
<b>Diperiksa</b>	:	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja  <b>SATRIYO WIBOWO, S.T., M.M.</b> NIP. 19760504 201001 1 011
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja  <b>M. ZAMRONI, S.Sos., M.Si.</b> NIP. 19730707 199303 1 010 

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negative dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Maka dari pada itu setiap Instansi Pemerintah diharuskan melakukan penilaian resiko (risk assessment) dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam tugas dan fungsinya.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

### **II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO**

#### **A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

**Formulir Kertas Kerja Rencana Monitoring Pi  
Pengkommunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2026  
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja  
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:</b>						
1	Pelatihan berbasis kompetensi (jumlah peserta pelatihan), Koordinasi Daerah Vokasi (terlaksananya koordinasi), Memfasilitasi lulusan sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (Terlaksananya job fair dengan BKK).	Melaksanakan monitoring atas Program Pelatihan yang telah diadakan, Melaksanakan monitoring fasilitasi Job Fair	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris, Kabid	Januari-Desember 2026	-	-

2	Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang (Tersedianya Laporan evaluasi Kinerja Tribulan)	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris, Kabid	Januari-Desember 2026	-	-
3	Digitalisasi Survei Kepuasan Masyarakat berbasis QR Code (Tersedianya stiker/standing banner QR Code di setiap loket)	Mencoba memindai QR Code secara mandiri untuk memastikan link aktif	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris, Kabid	Januari-Desember 2026	-	-
4	Sosialisasi budaya risiko bagi seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ( Terlaksananya sosialisasi), Implementasi Monitoring Evaluasi RTP (Dokumen Laporan Realisasi RTP)	Mencocokkan realisasi kegiatan dengan daftar mitigasi dalam Risk Register	Sekretaris	Januari-Desember 2026	-	-
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:</b>						
1	Layanan asistensi bagi perusahaan (Terlaksananya sesi asistensi bagi 25 SDM/tahun)	Monitoring bulanan terhadap jumlah dokumen RTK yang masuk	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Pengantar Kerja	Januari-Desember 2026	-	-

2	Menambahkan tahap asesmen awal (pre-test) untuk menilai kesiapan peserta (terlaksananya pre-test) dan Integrasi Program Pelatihan & Sertifikasi (Terbitnya Sertifikat Kompetensi BNSP bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan)	Evaluasi Hasil Sertifikasi: Rekapitulasi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dibanding jumlah yang lulus sertifikasi BNSP	Kepala Bidang Pelatihan	Januari-Desember 2026	-	-
3	Melakukan bimbingan dan pendampingan terkait pentingnya akreditasi lembaga (Jumlah LPK Swasta terakreditasi bertambah)	Verifikasi status akreditasi triwulanan	Kepala Bidang Pelatihan Kerja	Januari-Desember 2026	-	-
4	Pembentukan grup konsultasi berkelanjutan (mentoring digital) (Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring Pasca-Konsultasi)	Melakukan audit kecil untuk membandingkan output sebelum dan sesudah	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Januari-Desember 2026	-	-
5	Pelaporan hasil seleksi dari perusahaan kepada BKK dalam jangka waktu tertentu (Tersedianya database hasil penempatan tenaga kerja per masing-masing SMK yang menyelenggarakan Job Fair)	Melakukan kroscek antara data pelamar di Job Fair dengan penempatan di perusahaan	Kabid Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas	Pasca pelaksanaan Job Fair	-	-

6	1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal (Terlaksananya koordinasi) 2. Koordinasi dg Direktorat PTKLN (Terlaksananya koordinasi)	Verifikasi Data Kepulangan & Keberangkatan: Membandingkan data di SIAPKerja dengan laporan pengaduan kasus PMI non-prosedural	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Setiap Triwulan	-	-
7	Jemput bola dan penyediaan layanan konsultasi penyusunan PP/PKB (jumlah SK Pengesahan PP dan Nomor Pendaftaran PKB yang diterbitkan)	Verifikasi jumlah pengesahan PP baru	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Januari-Desember 2026	-	-
8	Koordinasi percepatan DBHCHT	Verifikasi bukti setor (NTPN) terhadap jumlah tagihan	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Setiap Pengajuan	-	-
9	Koordinasi intensif dengan Kementerian terkait penambahan kuota khusus daerah (Surat usulan penambahan kuota dan berita acara koordinasi)	Monitoring status keberangkatan transmigran sesuai rasio daftar	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Januari-Desember 2026	-	-

10	Melakukan koordinasi dan kerja sama kepada pihak - pihak terkait mengenai data yang dibutuhkan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya (Tersedianya dokumen hasil koordinasi data dan laporan evaluasi kinerja yang mempertimbangkan progres periode lalu)	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja	Kasubag Perencanaan	Januari-Desember 2026	Tiap Awal bulan Tribulan selanjutnya	-
11	Menetapkan deadline internal (misal: tanggal 5 setiap bulan) sebelum batas waktu resmi untuk memberikan ruang koreksi. Mewajibkan koordinasi antara bagian aset, bagian program, dan bendahara setiap bulan sebelum laporan final dicetak (Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Lembar Kendali Dokumen)	Memeriksa kesesuaian antara daftar checklist dengan fisik dokumen yang dikumpulkan PPTK	Kasubag Keuangan	Tiap Bulan	-	-

12	Menggencarkan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap anti korupsi dan gratifikasi (terlaksananya sosialisasi) serta Review Spesifikasi oleh Tim (Berita Acara Review Spesifikasi Teknis)	Pemeriksaan Fisik & Audit Kepatuhan: Mencocokkan kualitas material di lapangan dengan spesifikasi dalam kontrak	Tim Teknis / Atasan Langsung PPK	Selama masa rehab	-	-
----	---	---	----------------------------------	-------------------	---	---

## **B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I**

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir:

**Formulir Kertas Kerja Monitor Risk Even & RTP  
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Lamongan  
 Tahun Penilaian : 2025  
 Urusan Pemerintahan : Tenaga Kerja  
 Dinas Terkait : Dinas Tenaga Kerja

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja:</b>										
1	Terbatas nya kesempatan kerja	RSO.26.07.115.01	-	-	-	-	Pelatihan berbasis kompetensi (jumlah peserta pelatihan), Koordinasi Daerah Vokasi (terlaksananya koordinasi), Memfasilitasi lulusan sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (Terlaksananya job fair dengan BKK).	Januari-Desember 2026	-	-

2	Akuntabilitas kinerja internal rendah	RSO.26.07.115.02	-	-	-	Belum terjadi	Melaksanakan evaluasi kinerja tiap tribulan terhadap seluruh pejabat struktural dan melibatkan seluruh pegawai secara berjenjang (Tersedianya Laporan evaluasi Kinerja Tribulan)	Januari-Desember 2026	-	-
3	Kualitas pelayanan kurang optimal	RSO.26.07.115.03	-	-	-	Belum terjadi	Digitalisasi Survei Kepuasan Masyarakat berbasis QR Code (Tersedianya stiker/standing banner QR Code di setiap loket)	Januari-Desember 2026	-	-
4	Tidak tercapainya target Nilai Manajemen Risiko yang ditetapkan	RSO.26.07.115.04	-	-	-	Belum terjadi	Sosialisasi budaya risiko bagi seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ( Terlaksananya sosialisasi), Implementasi Monitoring Evaluasi RTP (Dokumen Laporan Realisasi RTP)	Januari-Desember 2026	-	-

**Risiko Operasional OPD Dinas Tenaga Kerja:**

1	Operasional: Belum semua SDM perusahaan mampu menyusun RTK Mikro	ROO.26. 07.115.0 1	-	-	-	Belum terjadi	Layanan asistensi bagi perusahaan (Terlaksananya sesi asistensi bagi 25 SDM/tahun)	Januari- Desember 2026	-	-
2	Risiko Operasional: Belum Semua Lulusan BLK Bersertifikat Kompetensi	ROO.26. 07.115.0 2	-	-	-	Belum terjadi	Menambahkan tahap asesmen awal (pre-test) untuk menilai kesiapan peserta (terlaksananya pre- test)dan Integrasi Program Pelatihan & Sertifikasi (Terbitnya Sertifikat Kompetensi BNSP bagi peserta yang dinyatakan lulus pelatihan)	Januari- Desember 2026	-	-
3	Kemitraan: Tidak semua lembaga pelatihan kerja mengikuti akreditasi	ROO.26. 07.115.0 3	-	-	-	Belum terjadi	Melakukan bimbingan dan pendampingan terkait pentingnya akreditasi lembaga (Jumlah LPK Swasta terakreditasi bertambah)	Januari- Desember 2026	-	-

4	Operasional: Rendahnya peningkatan produktivitas SDM pada perusahaan kecil pasca konsultasi.	ROO.26.07.115.04	-	-	-	Belum terjadi	Pembentukan grup konsultasi berkelanjutan (mentoring digital) (Tersedianya Dokumen Laporan Monitoring Pasca-Konsultasi)	Januari-Desember 2026	-	-
5	Operasional: Rendahnya penyerapan tenaga kerja (lulusan SMK) pasca pelaksanaan Job Fair di BKK	ROO.26.07.115.05	-	-	-	Belum terjadi	Pelaporan hasil seleksi dari perusahaan kepada BKK dalam jangka waktu tertentu (Tersedianya database hasil penempatan tenaga kerja per masing-masing SMK yang menyelenggarakan Job Fair)	Pasca pelaksanaan Job Fair	-	-
6	Kemitraan: Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal	ROO.26.07.115.06	-	-	-	Belum terjadi	1. Koordinasi Pemdes, BP2MI dan Aparatur untuk pencegahan PMI Ilegal (Terlaksananya koordinasi) 2. Koordinasi dg Direktorat PTKLN (Terlaksananya koordinasi)	Setiap Triwulan	-	-

7	Risiko Kemitraan: Rendahnya Kepatuhan Perusahaan	ROO.26.07.115.07	-	-	-	Belum terjadi	Jemput bola dan penyediaan layanan konsultasi penyusunan PP/PKB (jumlah SK Pengesahan PP dan Nomor Pendaftaran PKB yang diterbitkan)	Januari-Desember 2026	-	-
8	Risiko Kemitraan : Pembayaran BPJS terlambat	ROO.26.07.115.08	-	-	-	Belum terjadi	Koordinasi percepatan DBHCHT	Setiap Pengajuan	-	-
9	Kemitraan : Kuota pemberangkatan calon transmigrasi terbatas	ROO.26.07.115.09	-	-	-	Belum terjadi	Koordinasi intensif dengan Kementerian terkait penambahan kuota khusus daerah (Surat usulan penambahan kuota dan berita acara koordinasi)	Januari-Desember 2026	-	-
10	Risiko Operasional : Pelaporan hasil evaluasi kinerja tidak tepat waktu dan kurang maksimal	ROO.26.07.115.10	-	-	-	Belum terjadi	Melakukan koordinasi dan kerja sama kepada pihak - pihak terkait mengenai data yang dibutuhkan dan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya (Tersedianya	Januari-Desember 2026	Tiap Awal bulan Tribunal selanjutnya	-

							dokumen hasil koordinasi data dan laporan evaluasi kinerja yang mempertimbangan progres periode lalu)			
11	Operasional: Petugas Akuntansi/Bendahara menyampaikan laporan yang tidak akurat atau melewati batas waktu (deadline)	ROO.26.07.115.11	-	-	-	Belum terjadi	Menetapkan deadline internal (misal: tanggal 5 setiap bulan) sebelum batas waktu resmi untuk memberikan ruang koreksi. Mewajibkan koordinasi antara bagian aset, bagian program, dan bendahara setiap bulan sebelum laporan final dicetak (Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Lembar Kendali Dokumen)	Tiap Bulan	-	-
12	Fraud: Pengaturan pemenang dengan vendor tertentu	ROO.26.07.115.12		-	-	Belum terjadi	Menggencarkan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap anti korupsi dan gratifikasi	Selama masa rehab	-	-

							(terlaksana sosialisasi) serta Review Spesifikasi oleh Tim (Berita Acara Review Spesifikasi Teknis)			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan antara lain:

- Kurangnya pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko;
- Kurangnya pemenuhan data manajemen risiko;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian risiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi risiko. Tindakan pengendalian diperlukan evaluasi sebagai tindaklanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.